

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029





BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- ā. Kecamatan Pancung Soal;
- ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:52

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rasional Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Rasional Renstra ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Rasional Renstra Menjadi Pedoman dalam Merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Setiap Perangkat Daerah (PD) mewajibkan menyusun Rencana Renstra. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk Periode 5 (lima) Tahun.

Rasional Renstra Ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama Tahun 2025-2029 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Pengawasan. Rasional Renstra ini dilakukan karena keluarnya Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Menteri dalam Negeri RI No 54 Tahun 2010, didalam Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat perubahan sistematika Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan Rasional terhadap Renstra sesuai dengan perubahan aturan tersebut. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rasional Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapka masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga rasional Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan Rasional Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Painan, 14 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN



ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19690218 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Landasan Hukum	11
BAB II.....	16
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	16
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.....	16
KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	16
2.1. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	16
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.....	16
2.3. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.....	25
2.4. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.....	26
2.5. Kelompok sasaran layanan	31
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.....	31
2.7. Isu Strategis.....	34
BAB III.....	37
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	37
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	39
3.3. Strategi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	39
3.4. Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	40
BAB IV.....	42
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	42
4.1 .Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	42
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	82
4.3. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran ..	83
4.4. Indikator Kinerja Kunci.....	85
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan sendiri sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih cermat dalam menetapkan arah dan tujuan Pembangunan guna mencapai tata kelola Pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan suatu sistem penyelenggaraan yang terencana, berkelanjutan, dan berpedoman pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.

Pencapaian tujuan tata kelola Pemerintahan yang baik dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan melalui proses transformasi yang bertujuan untuk menciptakan kondisi ideal, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan Pembangunan sebagai upaya perubahan ke arah yang lebih baik.

Keberhasilan pencapaian tujuan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat bergantung pada kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, memahami tugas dan fungsinya, serta mampu bekerja secara sinergis dan koordinatif. Untuk mendukung hal ini, dibutuhkan pula instrumen pengukuran kinerja yang dapat menunjukkan akuntabilitas setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun dan menetapkan arah kebijakan serta tujuan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan (2025–2029), yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini disusun sebagai panduan kerja yang berorientasi pada hasil (output) dan memperhatikan potensi, peluang, serta tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Dokumen tersebut harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah.

Kewajiban penyusunan Renstra OPD juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:

Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra OPD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah;

Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Renstra kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dibutuhkan perencanaan yang komprehensif sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis dokumen perencanaan penting yang harus disusun, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra merupakan dokumen resmi Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah dan pembangunan daerah selama periode lima tahun masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menjadi dasar pencapaian visi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: **“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan.”**

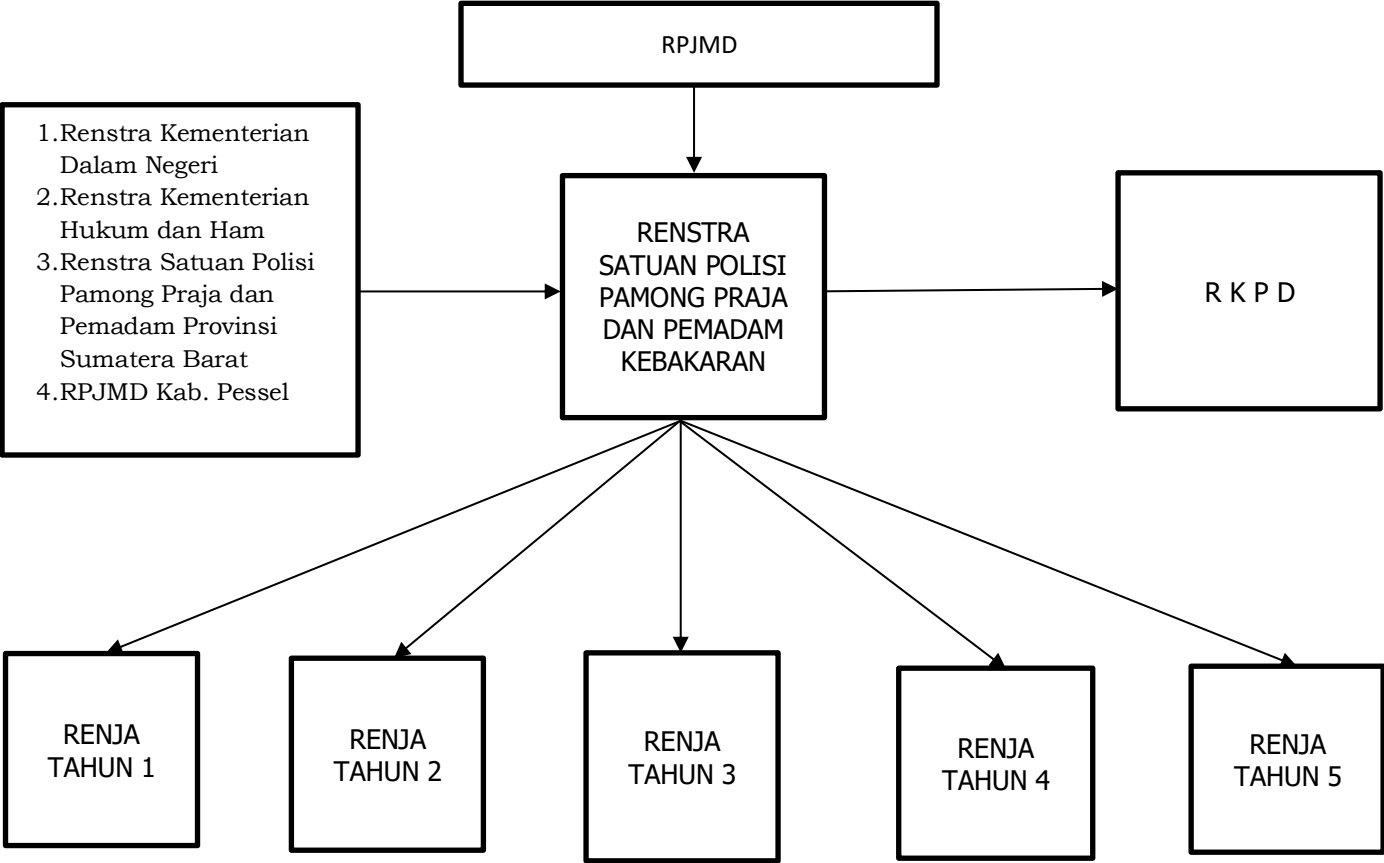
Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan strategis di tingkat nasional dan provinsi, seperti:

- 1) Renstra Kementerian Dalam Negeri
- 2) Renstra Kementerian Hukum Dan Ham
- 3) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat

Visi, misi, tujuan strategis, serta kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan untuk mendukung pencapaian program dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan harus memperhatikan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana digambarkan dalam bagan atau diagram alur perencanaan berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan



Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
- 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4. Visi dan Misi dari Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6806);
- 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urain Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk:

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kinerja tiap tahunnya;

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menentukan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan

- otonomi daerah;
2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
 3. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Adanya kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ini ditulis dengan sistematika penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diantaranya berisikan :

- 1.1 Latar Belakang menjelaskan tentang dasar-dasar pembuatan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029
- 1.2 Landasan Hukum menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang mengatur terkait renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.
- 1.3 Maksud Dan Tujuan menjelaskan tentang maksud dan tujuan pembuatan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.
- 1.4 Sistematika Penulisan menjelaskan tentang tata cara penulisan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam Bab II ini berisikan tentang :

- 2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Organisasi menjelaskan tentang uraian Tugas, fungsi dan struktur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran mulai dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.
 - c. Kinerja Pelayanan menjelaskan tentang kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

- d. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

- a. identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
- b. telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- c. telaah renstra k/1 renstra
- d. telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- e. penentuan isu-isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan memuat tentang :

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB IV ini memaparkan tentang:

- 4.1 Program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

1. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
2. Melakukan tindakan penertiban Non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
3. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
5. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
6. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
7. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dan diatur berdasarkan ketentuan yang telah diperbarui melalui Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, yang merupakan perubahan atas ketentuan sebelumnya.

Satuan ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program penegak peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegak peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegak peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati
- e. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah
- f. Penyelenggaraan penyiapan, pengadaan standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
- g. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran
- h. Penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran
- i. Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran
- j. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran
- k. Penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran
- l. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana
- m. Pelaksanaan pemberdaya masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- n. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- o. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- p. Pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran
- q. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi
- r. Penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang ketertiban umum, ketentaraman umum, ketentruman dan perlindungan masyarakat
- c. Bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah
- d. Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- e. Kelompok jabatan fungsional

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan. Sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian. Bidang oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Pada sekretariat dan bidang terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

UPTD dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.

Kepala Satuan

Tugas:

Melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas dan fungsi pembantuan di Bidang Ketertiban Umum, Ketentaraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang ketertiban umum, ketentaraman umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- b. Penyusunan program kegiatan pengembangan ketertiban umum, ketentaraman umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan bidang ketertiban umum, ketentaraman umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- d. Pelaksanaan administrasi satuan di bidang ketertiban umum, ketentaraman umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris

Tugas:

Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Satuan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan satuan;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan satuan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja satuan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan satuan;
- g. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab satuan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Menyiapkan dan mengoordinasikan penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Satuan

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan satuan;
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan satuan;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan satuan;
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
- g. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;

- h. Penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kasubag perencanaan, keuangan dan pelaporan

Tugas:

Menyiapkan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan yang menjadi tanggungjawab satuan

Fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecah permasalahan yang berkaitan dengan tugas tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian
- c. Pengoornasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis satuan
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
- f. Penyusunan program kerja tahunan satuan
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan satuan
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawab keuangan satuan
- i. Penyiapan berkas berkas keuangan dan pengadministrasia dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan satuan
- j. Mengoordinasikan dan penghimpunan laporan(rencana strategis, kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara, standar operasional prosedur, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja dan laporan lainnya
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Tugas:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidangmg ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Fungsi:

- a. Penyiapan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang ketertiban

umum , ketentraman dan perlindungan masyarakat berpedoman kepada rencana strategis satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- b. Perencanaan langkah-langkah bidang ketertiban umum , ketentraman dan perlindungan masyarakat berdasarkan rencana kerja satuan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan
- c. Pembagian tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas
- d. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengamanan objek vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
- e. Perumusan strategi pengendalian dan pengamanan objek vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat
- g. Penyusunan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat meliputi seksi pengendalian dan pengamanan objek vital , seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan fungsional tertentu
- h. Pengoordinasian dan melaksanakan tugas dibidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah

Tugas:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah .

Fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam hal penegakkan peraturan perundang-undangan daerah

- e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.
- f. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan
- g. Penyusunan pelaporan kinerja bidang
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan

Tugas :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan

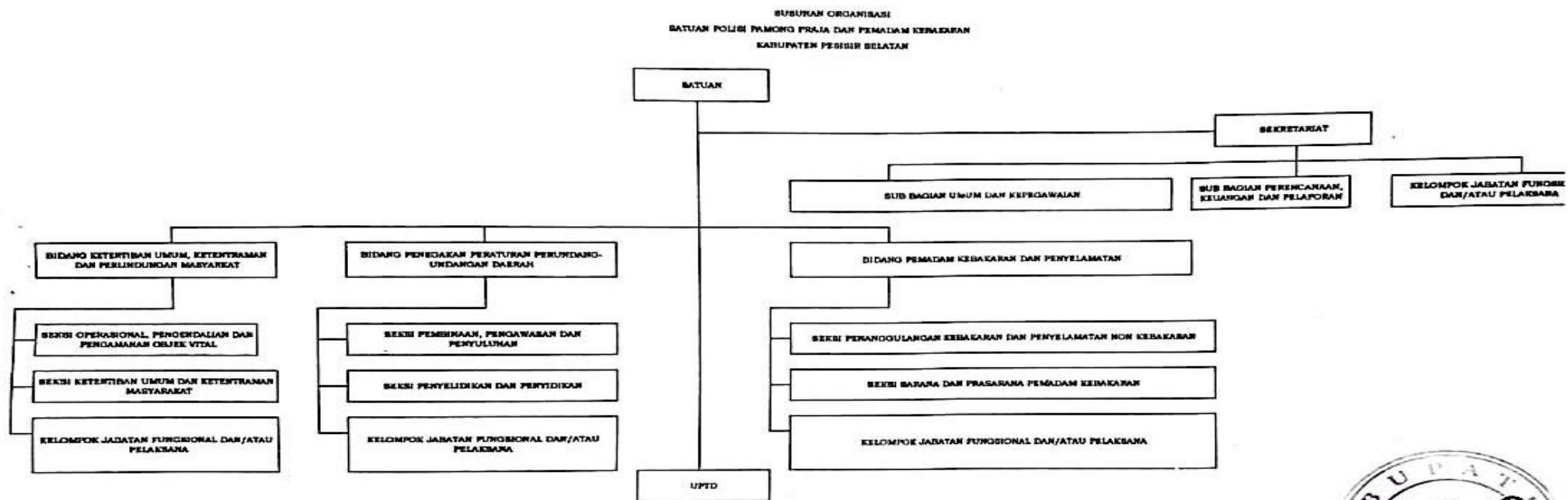
Fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Penyiapan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Perencanaan langkah-langkah bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan rencana kerja satuan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber daya yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan
- d. Pembagian tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas
- e. Pengoordinasian satuan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan baik yang berada di kabupaten maupun unit kecamatan
- f. Penyusunan petunjuk teknis penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pencegahan dan proteksi kebakaran
- g. Perumusan strategi penanggulangan kebakaran, pencegahan kebakaran dan penyelamatan
- h. Perumusan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup bidang pemadam kebakaran pada kejadian darurat non kebakaran
- i. Perumusan pola operasional usaha-usaha pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
- j. Penyusunan rekomendasi teknis tentang sebab dan akibat kebakaran serta rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran

- k. Perumusan kebijakan teknis penyusunan kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran
- l. Perumusan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan
- m. Pengoordinasian dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan
- n. Pelaksanaan hubungan kerja penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan
- p. Penyusunan kebijakan dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan meliputi seksi penganggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- q. Pengoordinasian dan melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- r. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan tentang pelaksanaan penganggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAMPUK
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, BERTA TATA KEB
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



2.3. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran cukup memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat.

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran didukung oleh 86 (delapan puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 102 (seratus dua) orang Non Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Golongan:

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	23
3.	Golongan II	59
4.	Golongan I	0
5.	Non ASN	102
Jumlah		188

Tabel 2.2.

Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (ASN) (Orang)
1	S2	5
2	S1	12
3	DIV	0
4	DIII	1
5	SLTA	68
6	SLTP	0
Jumlah		86

Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Gedung kantor yang terdiri dari 2 gedung kantor dengan fasilitas pendukungnya meja dan kursi yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.
- Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai seperti:
 - Mobil roda 4 dan 6
 - Motor
 - Kendaraan pemadam kebakaran
 - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan

- Fasilitas Telekomunikasi
- Dan lain-lain
- Kendaraan Satuan yang mendukung kegiatan Operasional
 - Kendaraan Roda 2 sebanyak 12 unit
 - Kendaraan Roda 4 sebanyak 6 unit
 - Kendaraan Roda 6 sebanyak 7 unit

2.4. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Demi terlaksanakannya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itupun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018, kinerja Satpol PP mencakup:

- a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada.
 - Melaksanakan tindakan penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Perda/Perkada.
 - Menyusun laporan hasil pengawasan dan penegakan hukum.
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - Melakukan patroli wilayah.
 - Mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum.
 - Melakukan tindakan non-yustisial untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban.
- c. Perlindungan Masyarakat
 - Membantu dalam penanggulangan bencana dan kerusakan sosial.
 - Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi gangguan ketertiban.

Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, serta Permendagri No. 16 Tahun 2020, kinerja Damkar mencakup:

- a. Pencegahan Kebakaran
 - Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran.
 - Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran di bangunan dan fasilitas umum.
 - Sertifikasi dan pelatihan pemadam kebakaran sukarela.

b. Pemadaman Kebakaran

- Respon cepat terhadap laporan kebakaran.
- Melakukan pemadaman secara efektif dan aman.
- Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemadaman skala besar.

c. Penyelamatan (Rescue)

- Evakuasi korban dari gedung terbakar, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dll.
- Penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3).
- Penyelamatan hewan dalam situasi darurat.

d. Pertolongan Darurat Non-Kebakaran

- Penanganan bencana alam (banjir, longsor, gempa).
- Penanganan kecelakaan industri dan rumah tangga.

e. Pelayanan Publik

- Peningkatan kualitas pelayanan publik terkait kebakaran dan penyelamatan.
- Pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2025 - 2029 menurut indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Tabel Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase gangguan transtbum yang dapat diselesaikan				85.23	87.95	91.11	92.00	93.02	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16
2	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan				0.75	0.79	0.85	0.89	0.91	84.34	84.34	84.34	94	94.67	84.34	84.34	84.34	92.00	94.67
3	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran				37.00	40.00	45.00	50.00	50.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
4	Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian		Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rata-rata pada Tahun ke -	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,831,136,938	6,817,627,584	6,374,130,538	6,315,646,538	6,315,694,538	5,676,996,673	6,546,253,720	5,655,097,273	5,655,097,273	5,655,097,273	97.36	96.02	88.72	89.54	89.54	5,809,344,882	5,655,097,273
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,373,300	35,948,980	35,897,239	35,898,239	35,901,239	21,164,100	35,921,720	21,184,100	21,184,100	21,184,100	94.60	99.92	59.01	59.01	59.01	22,373,300	21,184,100
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,373,300	35,948,980	35,897,239	35,898,239	35,901,239	21,164,100	35,921,720	21,184,100	21,184,100	21,184,100	94.60	99.92	59.01	59.01	59.01	22,373,300	21,184,100
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,117,913,292	4,686,118,244	4,434,721,893	4,434,723,893	4,434,729,893	4,060,542,262	4,491,242,223	4,060,322,862	4,060,322,862	4,060,322,862	98.61	95.84	91.56	91.56	91.56	4,117,913,292	4,060,322,862
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,027,313,292	4,438,433,417	4,228,677,306	4,228,678,306	4,228,681,306	3,972,942,262	4,382,065,028	3,972,722,862	3,972,722,862	3,972,722,862	98.65	98.73	93.95	93.95	93.95	4,027,313,292	3,972,722,862
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,600,000	247,684,827	206,044,587	206,045,587	206,048,587	87,600,000	109,177,195	87,600,000	87,600,000	87,600,000	96.69	44.08	42.52	42.51	42.51	90,600,000	87,600,000
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	30,262,700	-	2,000	8,000	-	30,102,000	-	-	-	-	99.47	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	30,262,700	-	1,000	4,000	-	30,102,000	-	-	-	-	99.47	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
	b. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	-	-	-	1,000	4,000	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	225,511,386	185,939,386	226,685,910	226,691,910	226,709,910	218,590,657	185,043,586	196,890,657	196,890,657	196,890,657	96.93	100	86.86	86.85	86.85	203,719,330	196,890,657
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,981,610	8,303,350	7,213,668	7,214,668	7,217,668	19,967,400	8,303,350	19967400	19967400	19967400	99.93	100.00	276.80	276.76	276.65	19,981,610	19967400
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,792,056	-	-	-	-	21,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Penyediaan Bahan Logistik kantor	59,268,220	43,088,188	41,953,926	41,954,926	41,957,926	59,061,057	43,085,658	59,061,057	59,061,057	59,061,057	99.65	99.99	140.78	140.77	140.76	59,268,220	59,061,057
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,023,500	15,974,048	22,270,816	22,271,816	22,274,816	47,717,200	15,973,320	47,717,200	47,717,200	47,717,200	99.36	100.00	214.26	214.25	214.22	48,023,500	47,717,200
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,400,000	5,400,000	4,040,000	4,041,000	4,044,000	4,320,000	4,680,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	41.54	86.67	106.93	106.90	106.82	10,400,000	4,320,000
	f. Fasilitas Kunjungan Tamu	18,000,000	25,025,000	23,402,500	23,403,500	23,406,500	18,000,000	25,025,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100	100.00	76.91	76.91	76.90	18,000,000	18,000,000
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,046,000	88,148,800	127,805,000	127,806,000	127,809,000	47,825,000	87,976,258	47,825,000	47,825,000	47,825,000	99.54	99.80	37.42	37.42	37.42	48,046,000	47,825,000
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,108,846,310	1,606,166,774	1,307,628,968	1,307,630,968	1,307,636,968	1,081,534,327	1,580,785,968	1,081,534,327	1,081,534,327	1,081,534,327	97.54	98.42	82.71	82.71	82.71	1,108,846,310	1,081,534,327
	a. Peneediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,405,050	69,392,424	76,332,118	76,333,118	76,336,118	43,093,397	51,561,618	43,093,397	43,093,397	43,093,397	62.09	74.30	56.46	56.45	56.45	69,405,050	43,093,397
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	1,039,441,260	1,536,774,350	1,231,296,850	1,231,297,850	1,231,300,850	1,038,440,930	1,529,224,350	1,038,440,930	1,038,440,930	1,038,440,930	99.90	99.51	84.34	84.34	84.34	1,039,441,260	1,038,440,930
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356,492,650	273,191,500	369,196,528	310,699,528	310,708,528	295,165,327	223,158,223	295,165,327	295,165,327	295,165,327	82.80	81.69	79.95	95.00	95.00	356,492,650	295,165,327
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	58,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350,892,650	244,055,500	289,950,528	289,951,528	289,954,528	289,585,327	194,222,863	289,585,327	289,585,327	289,585,327	82.53	79.58	99.87	99.87	99.87	350,892,650	289,585,327
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,600,000	7,400,000	7,850,000	7,851,000	7,854,000	5,580,000	7,200,000	5,580,000	5,580,000	5,580,000	99.64	97.30	71.08	71.07	71.05	5,600,000	5,580,000
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	21,736,000	12,896,000	12,897,000	12,900,000	-	21,735,360	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	-	-
																		-
B.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,548,736,182	369,068,218	209,635,884	419,286,768	419,331,768	1,459,760,680	349,172,968	1,459,760,680	1,459,760,680	1,459,760,680	94.25	94.61	696.33	348.15	348.12	1,548,736,182	1,459,760,680
	7 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu (1) Daerah kabupaten/Kota	297,469,700	318,757,208	209,635,884	209,641,884	209,659,884	291,830,700	308,516,008	291,830,700	291,830,700	291,830,700	98.10	96.79	139.21	139.20	139.19	297,469,700	291,830,700
	a. Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	297,469,700	282,097,478	153,302,934	153,303,934	153,306,934	291,830,700	277,964,878	291,830,700	291,830,700	291,830,700	98.10	98.54	190.36	190.36	190.36	297,469,700	291,830,700

	b. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	36,659,730	48,117,950	48,118,950	48,121,950	-	30,551,130	-	-	-	-	83.34	0.00	0.00	0.00	-	-
	c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang bemuansa Hak Asasi Manusia	-	-	5,276,985	5,277,985	5,280,985	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	-	-	-	1,000	4,000	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
	e. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	-	758,750	759,750	762,750	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	-	-	2,179,265	2,180,265	2,183,265	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	8. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1,251,266,482	50,311,010	-	2,000	8,000	1,167,929,980	40,656,960	1,167,929,980	1,167,929,980	1,167,929,980	93.34	21.00	33	-	33	1,251,266,482	1,167,929,980
	a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	2,500,000	50,311,010	-	1,000	4,000	2,500,000	40,656,960	2,500,000	2,500,000	2,500,000	####	80.81	#DIV/0!	####	#####	2,500,000	2,500,000
	b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1,248,766,482	-	-	1,000	4,000	1,165,429,980	-	1,165,429,980	1,165,429,980	1,165,429,980	93.33	0.00	0.00	0.00	29.00	1,248,766,482	1,165,429,980
C.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2,236,650,370	2,578,248,860	1,997,910,884	3,995,831,768	3,995,861,768	2,223,276,970	2,525,971,140	2,223,276,970	2,223,276,970	2,223,276,970	99.40	97.97	111.28	55.64	55.64	2,236,650,370	2,223,276,970
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan 9 Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,236,650,370	2,566,596,860	1,985,807,384	1,985,810,384	1,985,819,384	2,223,276,970	2,515,295,890	2,223,276,970	2,223,276,970	2,223,276,970	99.40	98.00	111.96	111.96	111.96	2,236,650,370	2,223,276,970
	a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	2,236,650,370	2,566,596,860	1,985,807,384	1,985,808,384	1,985,811,384	2,223,276,970	2,515,295,890	2,223,276,970	2,223,276,970	2,223,276,970	99.40	98.00	111.96	111.96	111.96	2,236,650,370	2,223,276,970
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	-	1,000	4,000	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
	c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	-	1,000	4,000	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-	-
	10 Investigasi Kejadian Kebakaran	-	9,436,000	7,609,000	7,610,000	7,613,000	-	8,835,250	-	-	-	-	93.63	0.00	0.00	0.00	-	-
	a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-	9,436,000	7,609,000	7,610,000	7,613,000	-	8,835,250	-	-	-	-	93.63	0.00	0.00	0.00	-	-
	11 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	2,216,000	4,494,500	4,495,500	4,498,500	-	1,840,000	-	-	-	-	83.03	0.00	0.00	0.00	-	-
	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	-	2,216,000	4,494,500	4,495,500	4,498,500	-	1,840,000	-	-	-	-	83.03	0.00	0.00	0.00	-	-
	TOTAL	9,616,523,490	9,764,944,662	8,581,677,306			9,360,034,323	9,421,397,828										

2.5. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran ini dapat berupa individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

Tabel 2.4

Tabel Kelompok Sasaran dan indikator Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

Sasaran	indikator
1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan	1. Persentase keselarasan sasaran program renstra satpol pp dan pemadam kebakaran dengan RPJMD 2. Persentase keselarasan sasaran program renja satpol PP dan Pemadam Kebakaran
2. Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	1. Nilai inovasi satpol PP dan Pemadam Kebakaran
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	1. Cakupan penegak perda dan perkada 2. Cakupan rasio petugas linmas 3. Cakupan layanan penanganan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah serta mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Pesisir Selatan periode 2025-2029, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

Urusan Bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum :

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan Bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pesisir Selatan antara tahun 2020 hingga 2024, seperti:

1. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Melanggar Aturan, Banyak PKL berjualan di trotoar, bahu jalan, atau area terlarang lainnya tanpa izin
2. Bangunan Liar atau Tanpa Izin (IMB) Munculnya bangunan liar di atas lahan negara, bantaran sungai, atau ruang terbuka hijau.
3. Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Anjal dan gepeng sering berkeliaran di perempatan jalan, pusat perbelanjaan, atau tempat ibadah, yang mengganggu kenyamanan umum
4. Kegiatan Hiburan atau Usaha Tanpa Izin (misalnya Karaoke, Cafe, Warung Remang-remang), Banyak tempat usaha hiburan malam beroperasi tanpa izin, melebihi jam operasional, atau melanggar norma sosial.
5. Pelaksanaan Penegakan Protokol Sosial atau Ketentuan Umum (Misalnya Saat Pandemi atau Perda Khusus), Warga tidak mematuhi peraturan daerah, seperti larangan kerumunan, tidak menggunakan masker (saat pandemi), atau membunyikan petasan di luar waktu yang ditentukan.

Untuk menanggulangi beberapa permasalahan tersebut diperlukan strategi penertiban diantaranya;

1. Menertibkan PKL yang menempati area publik secara ilegal, mengembalikan fungsi trotoar/jalan untuk pejalan kaki dan kendaraan.
2. Melakukan penertiban atau pembongkaran bangunan ilegal sesuai dengan peraturan daerah.
3. Melakukan razia dan pembinaan terhadap mereka bekerja sama dengan dinas sosial.
4. Menyegel tempat usaha ilegal dan melakukan patroli pengawasan secara berkala
5. Menindak pelanggaran Perda, melakukan edukasi, dan memberikan sanksi administratif atau teguran sesuai ketentuan.

Urusan Bidang peraturan Daerah

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan Bidang Peraturan daerah umum di Kabupaten Pesisir Selatan antara tahun 2020 hingga 2024, seperti:

1. Pelanggaran Perda tentang Ketertiban Umum, Warga membakar sampah sembarangan di area permukiman, menyebabkan polusi udara dan gangguan lingkungan.
2. Usaha Tanpa Izin Sesuai Perda Retribusi atau Perizinan, Warung, kafe, atau tempat hiburan beroperasi tanpa mengurus izin resmi (SIUP, HO, dsb.).
3. Pelanggaran Jam Operasional Tempat Hiburan Malam, Diskotek atau karaoke tetap buka melewati batas jam yang ditetapkan dalam Perda.

4. Pemasangan Reklame atau Spanduk Ilegal, Banyak reklame/spanduk iklan liar yang dipasang sembarangan tanpa izin di tiang listrik, pohon, atau jalan protokol.
5. Pelanggaran Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Warga merokok di area rumah sakit, sekolah, atau kantor pemerintahan yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok sesuai Perda.

Untuk menanggulangi beberapa permasalahan tersebut diperlukan strategi penertiban diantaranya;

1. Memberi teguran, sosialisasi Perda, serta melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran.
2. Melakukan inspeksi lapangan, menindak tempat usaha ilegal, serta menyegel jika terbukti melanggar Perda.
3. Melakukan patroli malam, memberi peringatan, dan menutup operasional bila melanggar aturan.
4. Melakukan pencopotan reklame ilegal dan menindak pemasang berdasarkan Perda tentang reklame dan ketertiban umum.
5. Melakukan pengawasan dan penindakan sesuai Perda, termasuk memberikan teguran atau sanksi administratif.

Urusan Bidang peraturan Daerah

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan Bidang Pemadam Kebakaran Dan non Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan antara tahun 2020 hingga 2024, seperti:

1. Kebakaran akibat korsleting listrik di permukiman padat, banyak rumah warga menggunakan instalasi listrik yang tidak sesuai standar, sehingga rawan korsleting dan kebakaran
2. Minimnya Sarana Proteksi Kebakaran di gedung umum, banyak gedung, toko, atau fasilitas publik tidak memiliki alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, atau sistem sprinkler.
3. Kebakaran di lahan kosong atau hutan kota, Pembakaran sampah atau semak di lahan kosong oleh warga bisa memicu kebakaran yang meluas.
4. Evakuasi hewan berbahaya di permukiman, warga sering menemukan ular, biawak, atau hewan liar lain masuk ke rumah.
5. Penanganan banjir dan evakuasi korban, saat musim hujan, terjadi banjir di beberapa wilayah yang memerlukan evakuasi cepat, terutama lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Untuk menanggulangi beberapa permasalahan tersebut diperlukan strategi penertiban diantaranya;

1. Melakukan pemadaman, evakuasi warga, serta sosialisasi pencegahan kebakaran di lingkungan padat penduduk.

2. Melakukan inspeksi rutin, memberikan teguran, dan menyarankan pemilik gedung untuk memenuhi standar keselamatan kebakaran sesuai Perda
3. Melakukan penanganan cepat kebakaran lahan serta edukasi tentang bahaya membakar sampah di ruang terbuka.
4. Unit Rescue Damkar mengevakuasi hewan dengan peralatan khusus dan mengedukasi warga untuk mencegah kejadian serupa.
5. Melakukan evakuasi, membantu distribusi logistik darurat, dan membantu penyedotan air di rumah-rumah terdampak.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan Trantib, Perda Dan Pemadam Kebakaran Dan Non Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan lebih optimal, meningkatkan jumlah penertiban, ketertiban umum, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keamanan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

2.7. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan non Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut:

Urusan Bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum :

1. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Banyak masyarakat yang belum memahami atau kurang patuh terhadap Perda dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah).
2. Tingginya pelanggaran ketertiban umum di ruang publik, parkir liar, pengamen dan gepeng, tawuran, parkir liar, balap liar, dan Menyebabkan gangguan kenyamanan dan potensi konflik sosial.
3. Keterbatasan Sumber Daya (SDM dan Sarana Prasarana), jumlah personel Satpol PP belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas masalah, Sarana patroli, kendaraan operasional, serta alat penertiban yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas.
4. Kurangnya koordinasi antar-instansi dalam penegakan perda, Dalam banyak kasus, penanganan pelanggaran membutuhkan kerja sama dengan instansi lain (Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Perizinan, dll.), Kurangnya sinergi menyebabkan proses penindakan berjalan lambat atau tidak efektif.
5. Belum Optimalnya Peran Satpol PP dalam Pencegahan Konflik Sosial, Satpol PP masih lebih dominan dalam penindakan daripada pencegahan, Padahal, peran preemtif dan preventif seperti sosialisasi, mediasi konflik, dan pembinaan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ketenteraman jangka panjang.

Urusan Bidang Peraturan daerah:

1. Rendahnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada, Masih banyak masyarakat yang melanggar Perda, baik karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau kurangnya sosialisasi.
2. Keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam penindakan hukum, Satpol PP hanya dapat melakukan tindakan administratif, tidak memiliki kewenangan penyidikan seperti kepolisian.
3. Kurangnya regulasi teknis turunan dari Perda, banyak Perda yang belum didukung dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau SOP teknis pelaksanaan.
4. Minimnya sumber daya manusia dan sarana pendukung, jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah pelanggaran yang harus diawasi.
5. Lemahnya Koordinasi Antar-Perangkat Daerah, Penegakan Perda sering kali memerlukan sinergi lintas sektor (Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dll).

Urusan Bidang Pemadam Kebakaran dan non kebakaran :

1. Tingginya risiko kebakaran di permukiman padat dan kawasan rentan, banyak wilayah permukiman padat penduduk menggunakan instalasi listrik yang tidak aman, minim alat proteksi kebakaran, dan memiliki akses jalan sempit.
2. Minimnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran, kendaraan pemadam yang tidak mencukupi atau tidak layak operasional, kekurangan alat pelindung diri (APD), dan belum meratanya pembangunan pos damkar di kecamatan atau wilayah strategis.
3. Kurangnya Personel Damkar yang Terlatih dan Tersertifikasi, Banyak petugas pemadam yang belum memiliki kompetensi teknis dan sertifikasi resmi (standar nasional).
4. Belum optimalnya layanan penyelamatan Non-Kebakaran (Rescue), kegiatan non-kebakaran seperti evakuasi hewan berbahaya, penyelamatan banjir, pertolongan kecelakaan, atau evakuasi bangunan roboh masih kurang tertangani secara profesional.
5. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran, banyak masyarakat belum memahami cara pencegahan kebakaran dan tidak memiliki alat pemadam awal (APAR) di rumah atau tempat kerja.

Tabel 2.3

Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

no	Penentuan Isu strategis
1	Penguatan peran struktur social dalam rangka mewujudkan masyarakat melek hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentrama dan ketertiban umum
2	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegak peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran
3	Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertical dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum
4	Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealis, mengandung nilai nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan yaitu mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari :

1. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Terwujudnya tata pemerintahan yang Berkualitas

Indikator Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih. Penjabaran Pada tingkat satuan teknis OPD dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran OPD teknis, Instansi vertical dan Masyarakat berkewajiban melaksanakan program pada rencana strategis ini dengan sebaik baiknya
2. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan penjabaran program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam matriks renstra satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam kebakaran
3. Satuan Polisi Pamong Praja Dan pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun renstra yang menjabarkan visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Dan renstra Dalam negeri
4. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran mempersiapkan standar operasional procedural pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan dukungan dituangkan dalam rencana kerja anggaran lima Tahun Kedepa

TABEL 3.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN											
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran sesuai waktu tanggap/respons time, penyelamatan dan pelayanan non kebakaran		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Trantibum (%)	91	92	92	92	93	94	95	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Kebakaran (%)	67,74	70	70	70	70	70	70	
		kecepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (Respon Time) (%)	59,6	60	61	62	63	64	65	
		meningkatkan upaya penanganan gangguan trantibum Perda dan Perkada	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	91,67	92	93	94	95	96	97	
			Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan (Perda/Perkada)	1	1	1	1	1	1	1	
			Persentase kecepatan penanganan kebakaran dan penyelamatan (%)	59,6	60	61	62	63	64	65	
		kecepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah kejadian non kebakaran yang terlayani (Angka)	58	56	54	52	50	48	47	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029.

3.3. Strategi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. Strategi pada setiap tahapan pembangunan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan pemadam kebakaran
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Peningkatan system pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis digital	Pelatihan SDM tentang Akuntabilitas dan Integritas	Audit internal dan peningkatan kapasitas manajemen kinerja	Pemantapan system reward dan punishment	Evaluasi menyeluruh
Meningkatnya Inovasi satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Identifikasi kebutuhan dan peluang inovasi	Pengembangan aplikasi layanan pengaduan masyarakat	Impelementasi inovasi layanan cepat tanggap	Inovasi kolaborasi dengan instansi lain	Penguatan inovasi berbasis Digital
Meningkatnya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Penegak perda secara persuasif dan edukatif	Operasi terpadu lintas sector	Penambahan personil dan sarana patroli/operasi	Pengawasan wilayah berbasis zona rawan	Pemanfaatan CCTV dan command center terpadu
Meningkatnya kualitas Peraturan Daerah	Identifikasi perda yang tidak efektif	Kajian akademik dan revisi perda prioritas	Sosialisasi dan uji publik perda baru	Pelatihan aparatur penegak perda	Penguatan pelaksanaan penegakkan perda
Meningkatnya kualitas Pemadam Kebakaran	Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebaran	Pengadaan armada dan peralatan pemadam kebakaran	Pelatihan khusus personil pemadam kebakaran	Pembentukan unit pemadam kebakaran Nagari/Kecamatan	Sertifikasi kompetensi dan simulasi tingkat daerah
Meningkatnya kualitas Non Kebakaran	Identifikasi kebutuhan dan permasalahan	Perencanaan program dan regulasi sebagai dasar operasional	Penguatan SDM dan sarana prasarana	Pelaksanaan operasional non kebakaran	Evaluasi yang berkelanjutan

3.4. Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. Rumusan arah kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1.	Penyelenggaraan ketenraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan Masyarakat.	- Meningkatnya kualitas layanan internal satpol pp dan damkar - Meningkatnya dokumen perencanaan, Pengendalian, Evaluasi satpol pp dan damkar - Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Inovasi
2.	Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif.	- Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan trantib, perda dan pemadam kebakaran - Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan trantib, perda dan pemadam kebakaran - Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan trantib, perda dan pemadam kebakaran - Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan trantib, perda dan pemadam kebakaran - Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah - Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan trantib, perda dan pemadam kebakaran
3.	Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada kawasan strategis, objek vital dan kawasan parawisata	Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategi dan potensial.	- Meningkatnya Pengelolaan satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Uraian strategi dan arah kebijakan sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran untuk lima tahun mendatang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Visi	:	Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju Dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional		
Misi 1	:	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif , Demokratis Dan Transparan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.Terwujudnya reformasi bikokrasi yang bekinerja tinggi		Terwujudnya reformasi birokrasi yang bekinerja tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan bekinerja	Kualifikasi penilaian reformasi birokrasi dan nilai AKIP
			Kapalitas birokrasi	Peningkatan indeks inovasi

Misi 2	:	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan dinamis		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	Cakup penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Peningkatan sarana dan prasarana satpol pp dan damkar
			Cakupan rasio petugas Linmas	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi masyarakat
			Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 .Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rancangan dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dan penyusunan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebagai pijakan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tahun 2025-2029. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada penanganan kebakaran sesuai waktu tanggap/respons time, penyelamatan dan pelayanan non kebakaran				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Trantibum (%)		
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Kebakaran (%)		
		meningkatnya upaya penanganan gangguan trantibum Perda dan Perkada			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
					Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan (Perda/Perkada)		
					Persentase kecepatan penanganan kebakaran dan penyelamatan (%)		
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Inovasi (Inovasi)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran sesuai waktu tanggap/respons time, penyelamatan dan pelayanan non kebakaran				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Trantibum (%)		
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Kebakaran (%)		
		meningkatnya upaya penanganan gangguan trantibum Perda dan Perkada			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
					Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan (Perda/Perkada)		
					Persentase kecepatan penanganan kebakaran dan penyelamatan (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Inovasi (Inovasi)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan TunjangN ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Barang atau asset yang dimiliki	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah Barang atau asset yang dimiliki	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Kendraan Perorangan Dinas Atau Kendraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra
Satuan polisi pamong praja dan Pemadam kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.372.063.916		10.448.640.000		11.374.340.000		12.245.240.000		13.000.440.000					
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.947.264.916		8.889.140.000		9.673.140.000		10.397.940.000		10.992.540.000					
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	7.947.264.916	1	8.889.140.000	1	9.673.140.000	1	10.397.940.000	1	10.992.540.000	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	85	91				92				93				94		95
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	79	81				82				83				84		85
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				260.000.000		313.000.000		365.000.000		420.000.000		495.000.000					
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6	260.000.000	7	313.000.000	8	365.000.000	9	420.000.000	10	495.000.000					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	6				7				8				9		10

	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	6		7		8		9		10			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	15		17		17		18		18			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	6		7		8		9		10			
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	6		7		8		9		10			
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	6		8		10		12		13			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	6		8		10		12		13			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		70.000.000		90.000.000		110.000.000		150.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	15	50.000.000	17	70.000.000	17	90.000.000	18	110.000.000	18	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	6	30.000.000	8	35.000.000	10	40.000.000	12	45.000.000	13	50.000.000		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	6	30.000.000	8	35.000.000	10	40.000.000	12	45.000.000	13	50.000.000		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	6	30.000.000	7	35.000.000	8	40.000.000	9	45.000.000	10	50.000.000		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	6	30.000.000	7	35.000.000	8	40.000.000	9	45.000.000	10	50.000.000		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6	30.000.000	7	35.000.000	8	40.000.000	9	45.000.000	10	50.000.000		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	6	30.000.000	7	35.000.000	8	40.000.000	9	45.000.000	10	50.000.000		
1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				30.000.000		33.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	6	30.000.000	7	33.000.000	8	35.000.000	9	40.000.000	10	45.000.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.824.860.214		5.420.000.000		5.940.000.000		6.270.000.000		6.488.800.000		
Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan TunjangN ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	6	4.824.860.214	7	5.420.000.000	8	5.940.000.000	9	6.270.000.000	10	6.488.800.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	6				7		8		9		10	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		15		18		20		21			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14		14		14		14					
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.557.760.213		5.000.000.000		5.500.000.000		5.800.000.000		6.000.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	4.557.760.213	14	5.000.000.000	14	5.500.000.000	14	5.800.000.000	14	6.000.000.000		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				207.100.001		350.000.000		360.000.000		380.000.000		388.800.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	207.100.001	15	350.000.000	18	360.000.000	20	380.000.000	21	388.800.000		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	6	30.000.000	7	35.000.000	8	40.000.000	9	45.000.000	10	50.000.000		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	6	30.000.000	7	35.000.000	8	40.000.000	9	45.000.000	10	50.000.000		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				370.000.000		435.000.000		510.000.000		585.000.000		660.000.000		
Jumlah Barang atau asset yang dimiliki	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	370.000.000	12	435.000.000	12	510.000.000	12	585.000.000	12	660.000.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	6		7		8		9		10			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	6		7		8		9		10			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	6		7		8		9		10			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	7		8		9		10		11			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	6		7		8		9		10			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	13		14		15		16		17			
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				130.000.000		145.000.000		160.000.000		175.000.000		190.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	13	130.000.000	14	145.000.000	15	160.000.000	16	175.000.000	17	190.000.000		
1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	7	70.000.000	8	80.000.000	9	90.000.000	10	100.000.000	11	110.000.000		
1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	6	70.000.000	7	80.000.000	8	90.000.000	9	100.000.000	10	110.000.000		
1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				40.000.000		50.000.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	6	40.000.000	7	50.000.000	8	60.000.000	9	80.000.000	10	100.000.000		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.000.000		40.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	30.000.000	12	40.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	6	15.000.000	7	20.000.000	8	25.000.000	9	30.000.000	10	35.000.000		
1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	6	15.000.000	7	20.000.000	8	25.000.000	9	30.000.000	10	35.000.000		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				263.000.000		264.000.000		265.000.000		266.000.000		267.000.000		
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	225	263.000.000	226	264.000.000	227	265.000.000	228	266.000.000	229	267.000.000		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				263.000.000		264.000.000		265.000.000		266.000.000		267.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	225	263.000.000	226	264.000.000	227	265.000.000	228	266.000.000	229	267.000.000		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				480.000.000		596.000.000		708.000.000		820.000.000		932.000.000		
Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	480.000.000	13	596.000.000	14	708.000.000	15	820.000.000	16	932.000.000		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	10		11		12		13		14			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	14		16		18		20		22			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	14		16		18		20		22			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		3		4		5		6			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	2		3		4		5		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		3		4		5		6			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10		15		20		25		30			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.000.000		28.000.000		42.000.000		56.000.000		70.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	14.000.000	3	28.000.000	4	42.000.000	5	56.000.000	6	70.000.000		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10	25.000.000	15	30.000.000	20	35.000.000	25	40.000.000	30	45.000.000		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	4	20.000.000	4	25.000.000	4	26.000.000	4	27.000.000	4	28.000.000		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		120.000.000		160.000.000		200.000.000		240.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	80.000.000	3	120.000.000	4	160.000.000	5	200.000.000	6	240.000.000		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	2	40.000.000	3	60.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000	6	120.000.000		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	6.000.000	13	7.000.000	14	8.000.000	15	9.000.000	16	10.000.000		
1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	14	35.000.000	16	40.000.000	18	45.000.000	20	50.000.000	22	55.000.000		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	14	150.000.000	16	175.000.000	18	200.000.000	20	225.000.000	22	250.000.000		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	10	10.000.000	11	11.000.000	12	12.000.000	13	13.000.000	14	14.000.000		
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				873.900.000		903.200.000		914.700.000		958.000.000		1.005.300.000		
Jumlah Barang atau asset yang dimiliki	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	873.900.000	4	903.200.000	3	914.700.000	3	958.000.000	4	1.005.300.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		7		9		11		13			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		7		9		11		13			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8		10		12		14		16			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	36		36		36		36		36			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3		4		5		6		7			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.000.000		88.000.000		66.000.000		66.000.000		88.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	88.000.000	4	88.000.000	3	66.000.000	3	66.000.000	4	88.000.000		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				7.500.000		10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	7.500.000	4	10.000.000	5	12.500.000	6	15.000.000	7	17.500.000		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.600.000		96.400.000		115.200.000		143.000.000		152.800.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8	77.600.000	10	96.400.000	12	115.200.000	14	143.000.000	16	152.800.000		
1.05.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				120.800.000		120.800.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	36	120.800.000	36	120.800.000	36	125.000.000	36	130.000.000	36	135.000.000		
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		14.000.000		18.000.000		22.000.000		26.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	10.000.000	7	14.000.000	9	18.000.000	11	22.000.000	13	26.000.000		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		14.000.000		18.000.000		22.000.000		26.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	10.000.000	7	14.000.000	9	18.000.000	11	22.000.000	13	26.000.000		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				312.000.000		369.000.000		363.000.000		453.000.000		500.000.000		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	312.000.000	13	369.000.000	14	363.000.000	15	453.000.000	16	500.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	13		14		15		16		17			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		13		14		15		16			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				92.000.000		99.000.000		106.000.000		113.000.000		120.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	13	92.000.000	14	99.000.000	15	106.000.000	16	113.000.000	17	120.000.000		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		150.000.000		170.000.000		190.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	120.000.000	13	150.000.000	14	170.000.000	15	190.000.000	16	200.000.000		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000.000		120.000.000		87.000.000		150.000.000		180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	100.000.000	13	120.000.000	14	87.000.000	15	150.000.000	16	180.000.000		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				563.504.702		588.940.000		607.440.000		625.940.000		644.440.000		
Jumlah Kendraan Perorangan Dinas Atau Kendraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	563.504.702	1	588.940.000	1	607.440.000	1	625.940.000	1	644.440.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4		6		8		10		12			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	14		16		18		20		22			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	30		40		50		60		70			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	36		36		36		36		36			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4		5		6		7		8			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4		6		8		10		12			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.190.000		39.190.000		39.190.000		39.190.000		39.190.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	39.190.000	1	39.190.000	1	39.190.000	1	39.190.000	1	39.190.000		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				339.950.000		339.950.000		339.950.000		339.950.000		339.950.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakndan Perizinannya (Unit)	0	15	339.950.000	15	339.950.000	15	339.950.000	15	339.950.000	15	339.950.000		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	30	30.000.000	40	40.000.000	50	50.000.000	60	60.000.000	70	70.000.000		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.250.000		10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	14	9.250.000	16	10.000.000	18	12.500.000	20	15.000.000	22	17.500.000		
1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				120.800.000		120.800.000		120.800.000		120.800.000		120.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	36	120.800.000	36	120.800.000	36	120.800.000	36	120.800.000	36	120.800.000		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.578.451		13.000.000		15.000.000		17.000.000		19.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4	11.578.451	5	13.000.000	6	15.000.000	7	17.000.000	8	19.000.000		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.157.800		13.000.000		15.000.000		17.000.000		19.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4	1.157.800	6	13.000.000	8	15.000.000	10	17.000.000	12	19.000.000		
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.578.451		13.000.000		15.000.000		17.000.000		19.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4	11.578.451	6	13.000.000	8	15.000.000	10	17.000.000	12	19.000.000		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.130.000.000		1.235.700.000		1.346.200.000		1.460.200.000		1.578.200.000		
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Persentase)	91	93	1.130.000.000	94	1.235.700.000	95	1.346.200.000	96	1.460.200.000	97	1.578.200.000	1.05.0.00.0.00.03.00 – SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	85	86		87		88		89		90			
	Jumlah sosialisasi penyuluhan Perda dan Perkada (Angka)	4	4		3		3		3		3			
	Jumlah Perda dan Perkada (Angka)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah pengamanan pejabat negara, event, objek vital ddan hari tertentu (Angka)	10	12		13		14		15		16			
	Jumlah operai trantibum yang dilaksanakan (Angka)	144	240		288		336		365		365			
	Jumlah kasus gangguan, respon cepat, penanganan kasus, penguatan operasi dan patroli, partisipasi masyarakat (Angka)	48	52		54		56		57		58			
	Jumlah ASN ikut diklat PPNS, kebutuhan Linmas Nagari, Kecamatan dan Kabupaten (Angka)	2	1		1		1		1		1			
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				791.200.000		872.700.000		945.200.000		1.035.200.000		1.096.200.000		
Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai SOP	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	2.730	791.200.000	2.730	872.700.000	2.730	945.200.000	2.730	1.035.200.000	2.730	1.096.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	44		44		44		44		44			
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	0	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	8		9		10		11		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	12		14		16		18		20			
	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	20		22		24		26		28			
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0	30		35		40		45		50			
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (Dokumen)	0	20		22		24		26		28			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	197		197		197		197		197			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0	0		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	18		20		22		24		26			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	5		7		9		11		13			
	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	2.730		2.730		2.730		2.730		2.730			
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				24.000.000		28.000.000		32.000.000		46.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	12	24.000.000	14	28.000.000	16	32.000.000	18	46.000.000	20	50.000.000		
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				24.000.000		28.000.000		32.000.000		46.000.000		50.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	197	24.000.000	197	28.000.000	197	32.000.000	197	46.000.000	197	50.000.000		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				68.000.000		71.000.000		74.000.000		77.000.000		81.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	8	68.000.000	9	71.000.000	10	74.000.000	11	77.000.000	12	81.000.000		
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	44	24.000.000	44	24.000.000	44	24.000.000	44	24.000.000	44	24.000.000		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				190.000.000		190.000.000		190.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	2.730	190.000.000	2.730	190.000.000	2.730	190.000.000	2.730	200.000.000	2.730	200.000.000		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	2.730	190.000.000	2.730	190.000.000	2.730	190.000.000	2.730	190.000.000	2.730	190.000.000		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				0		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	0	0	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				0		24.000.000		36.000.000		48.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0	0	0	12	24.000.000	12	36.000.000	12	48.000.000	12	60.000.000		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniLaporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	18	70.000.000	20	75.000.000	22	80.000.000	24	85.000.000	26	90.000.000		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				10.000.000		15.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	5	10.000.000	7	15.000.000	9	40.000.000	11	50.000.000	13	60.000.000		
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0	30	30.000.000	35	35.000.000	40	40.000.000	45	45.000.000	50	50.000.000		
1.05.02.2.01.0020 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	20	20.000.000	22	22.000.000	24	24.000.000	26	26.000.000	28	28.000.000		
1.05.02.2.01.0021 - Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000		
Tersedianya Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (Dokumen)	0	20	20.000.000	22	22.000.000	24	24.000.000	26	26.000.000	28	28.000.000		
1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	0	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		
1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum				20.000.000		25.000.000		25.000.000		27.500.000		30.000.000		
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.000.000		
1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota				60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000				
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				24.200.000		24.200.000		24.200.000		24.200.000		24.200.000				
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	0	11	24.200.000	11	24.200.000	11	24.200.000	11	24.200.000	11	24.200.000				
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				267.000.000		267.000.000		267.000.000		267.000.000		330.000.000				
Perda Satpolpp tentang Trantibum dan Sosialisasi Perda Trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	0	10	267.000.000	10	267.000.000	10	267.000.000	10	267.000.000	10	330.000.000				
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	15				15				15			15		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	4				4				4			4		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	12				12				12			12		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	15				15				15			15		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	0	15				15				15			15		
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	15				15				15			15		
	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	15				15				15			15		
	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	0	15				15				15			15		
	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	12				12				12			12		
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		25.000.000				
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	25.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		20.000.000		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	20.000.000		
1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	0	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	100.000.000		
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	20.000.000		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	20.000.000		
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasn Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemberkasn Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasn Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	20.000.000		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	0	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		
1.05.02.2.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOROUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	0	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				71.800.000		96.000.000		134.000.000		158.000.000		152.000.000		
Jumlah Aparatur Yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	12	71.800.000	12	96.000.000	12	134.000.000	12	158.000.000	12	152.000.000		
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	24		24		24		24					
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	12		12		12		12					
	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				11.800.000		20.000.000		35.000.000		45.000.000		42.000.000		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	2	11.800.000	2	20.000.000	2	35.000.000	2	45.000.000	2	42.000.000		
1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				24.000.000		30.000.000		40.000.000		42.000.000		40.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	24	24.000.000	24	30.000.000	24	40.000.000	24	42.000.000	24	40.000.000		
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				12.000.000		17.000.000		30.000.000		32.000.000		30.000.000		
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	12	12.000.000	12	17.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000	12	30.000.000		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				12.000.000		17.000.000		17.000.000		27.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	12	12.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	27.000.000	12	20.000.000		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	20.000.000		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				294.799.000		323.800.000		355.000.000		387.100.000		429.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran (Menit)	15	15	294.799.000	15	323.800.000	15	355.000.000	15	387.100.000	15	429.700.000	1.05.0.00.0.00.03.000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan dan relawan kebakaran yang terbentuk disetiap nagari (Angka)	182	182		182		182		182		182			
	Jumlah Pos Pemadam kebakaran dan alat pemadam pompa portable di tempat yang jauh dari jangkauan pos damkar (Angka)	4	6		8		10		12		15			
	Jumlah kejadian non kebakaran yang tertangani (Angka)	58	54		52		50		48		46			
	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani pertahun (Angka)	52	45		46		47		48		49			
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				290.500.000		294.5.000		298.500.000		302.500.000		306.500.000		
Jumlah Laporan dan Penanganan Pemadaman & Penyelamatan yang dilakukan Petugas Piket Dalam Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	4	290.500.000	5	294.500.000	6	298.500.000	7	302.500.000	8	306.500.000		
	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	6		7		8		9		10			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran (laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	5	12.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				18.000.000		21.000.000		24.000.000		27.000.000		30.000.000		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	6	18.000.000	7	21.000.000	8	24.000.000	9	27.000.000	10	30.000.000		
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	4	4.000.000	5	5.000.000	6	6.000.000	7	7.000.000	8	8.000.000		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	16	24.000.000	16	24.000.000	16	24.000.000	16	24.000.000	16	24.000.000		
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	24	24.000.000	24	24.000.000	24	24.000.000	24	24.000.000	24	24.000.000		
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	0	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000		
1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.05.04.2.01.0021 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
1.05.04.2.01.0023 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
1.05.04.2.01.0025 - Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
1.05.04.2.01.0027 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				4.000.000		6.000.000		8.000.000		11.000.000		27.000.000		
jumlah layanan pencegahan kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0	1	4.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	11.000.000	1	27.000.000		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	0		0		0		12		17			
	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	0	2		4		6		8		10			
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
1.05.04.2.02.0004 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan				2.000.000		4.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000		
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	0	2	2.000.000	4	4.000.000	6	6.000.000	8	8.000.000	10	10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0		0		0		1.000.000		15.000.000		
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	12	1.000.000	17	15.000.000		
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran				99.000		13.000.000		34.000.000		47.000.000		57.000.000		
Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran (Orang)	0	0	99.000	6	13.000.000	8	34.000.000	10	47.000.000	12	57.000.000		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	12	12		15		15		18		18			
	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran (Laporan)	0	0		4		20		25		30			
	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Laporan)	0	1		2		3		4		5			
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				0		5.000.000		5.000.000		8.000.000		8.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	12	12	0	15	5.000.000	15	5.000.000	18	8.000.000	18	8.000.000		
1.05.04.2.03.0002 - Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				99.000		2.000.000		5.000.000		8.000.000		11.000.000		
Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Laporan)	0	1	99.000	2	2.000.000	3	5.000.000	4	8.000.000	5	11.000.000		
1.05.04.2.03.0003 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran				0		2.000.000		4.000.000		6.000.000		8.000.000		
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran (Orang)	0	0	0	6	2.000.000	8	4.000.000	10	6.000.000	12	8.000.000		
1.05.04.2.03.0004 - Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran				0		4.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran (Laporan)	0	0	0	4	4.000.000	20	20.000.000	25	25.000.000	30	30.000.000		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				200.000		200.000		3.500.000		2.100.000		200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahun	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)			200.000		200.000		3.500.000		2.100.000		200.000						
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	546	550				560				570					580		590
	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)																	
	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit)	0	100				110				120					130		140
	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)																	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)																	
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				100.000		100.000		3.400.000		100.000		100.000						
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	546	550	100.000	560	100.000	570	3.400.000	580	100.000	590	100.000						
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				0		0		0		0		0						
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)			0		0		0		0		0						
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				0		0		0		0		0						
Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)			0		0		0		0		0						
1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran				0		0		0		0		0						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)			0		0		0		0		0						
1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				100.000		100.000		100.000		2.000.000		100.000						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit)	0	100	100.000	110	100.000	120	100.000	130	2.000.000	140	100.000						
1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				0		0		0		0		0						
Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)			0		0		0		0		0						
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				0		10.100.000		11.000.000		24.500.000		39.000.000						
jumlah layanan pencegahan kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	0	0	1	10.100.000	1	11.000.000	2	24.500.000	1	39.000.000						
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	0	0				0				2							
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	0				0				7				0			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	0	118				116				110				112		110	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	0				5				2				1		3	
1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				0		5.000.000		2.500.000		1.500.000		5.000.000						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	0	118	0	116	5.000.000	110	2.500.000	112	1.500.000	110	5.000.000		
1.05.04.2.05.0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				0		5.000.000		2.500.000		1.500.000		26.000.000		
Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	0	0	5	5.000.000	2	2.500.000	1	1.500.000	3	26.000.000		
1.05.04.2.05.0008 - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				0		0		0		8.500.000		0		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	7	8.500.000	0	0		
1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				0		100.000		6.000.000		11.000.000		5.000.000		
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	0	0	1	100.000	1	6.000.000	2	11.000.000	1	5.000.000		
1.05.04.2.05.0010 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				0		0		0		2.000.000		3.000.000		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2	3.000.000		

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
			1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
			1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
2.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
			1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0021 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
			1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			1.05.04.2.03.0002 - Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			1.05.04.2.03.0003 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	
			1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	
			1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
			1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
			1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.05.0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
			1.05.04.2.05.0008 - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
			1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;

3. Seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap OPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahun; SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029 dengan Renstra- OPD Kabupaten Pesisir Selatan
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan OPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
9. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
10. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
11. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

4.3. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									
2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Trantibum	%	91	92	92	92	93	94	95	
3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Kebakaran	%	67,74	70	70	70	70	70	70	
4.	Persentase Pelayanan Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (Respon Time)	%	59,6	60	61	62	63	64	65	
5.	Jumlah kejadian non kebakaran yang terlayani	Angka	58	56	54	52	50	48	47	
6.	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Terhadap evaluasi AKIP	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1	

4.4. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	komulatif	Persentase	91	92	93	94	95	96	97	
3.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran	komulatif	Menit	15	15	15	15	15	15	15	
5.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	komulatif	%	85	85	86	87	88	89	90	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

CASCADING 2025

